



KODE ARTIKEL : SPM-25-6-2-4

Evaluasi Demokrasi Internal Partai Politik di Indonesia : Optimalisasi Transparansi dan Partisipasi untuk Mencegah Oligarki

Hermawan Prasojo, Enny Dwi Cahyani, Syarafina Dyah Amalia, Helmi Gunawan

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

*email korespondensi : hermawan.prasojo1501@unsoed.ac.id

ABSTRAK

Transparansi dalam seleksi kandidat partai politik merupakan elemen krusial yang memengaruhi kualitas demokrasi internal dan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini mengeksplorasi kondisi transparansi dalam proses seleksi kandidat Calon Anggota DPR dan DPRD di partai-partai politik khususnya PDIP, Golkar, dan Gerindra, serta dampaknya terhadap partisipasi anggota dan legitimasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa seleksi bakal calon dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART Partai Politik, namun dalam praktiknya belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan perwakilan partai dan kajian literatur dimana ditemukan bahwa faktor paling dominan dalam penetapan kandidat bukan aspirasi internal partai politik namun secara berurutan adalah elit partai politik, kemampuan finansial, elektabilitas, dan loyalitas terhadap partai politik. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan kualitas perwakilan publik menurun dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, penelitian ini merekomendasikan penerapan primary election, publikasi kriteria seleksi, pengawasan oleh KPU, pendidikan politik bagi anggota, serta pelaksanaan audit dan forum terbuka. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat mengurangi dominasi elit dan memastikan kandidat yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan publik, sehingga memperkuat demokrasi dan kesejahteraan di Indonesia. Dengan belajar dari praktik di negara lain, Indonesia memiliki peluang untuk membangun demokrasi internal partai politik yang lebih inklusif dan transparan.

Kata kunci : demokrasi internal, partai politik, seleksi kandidat, dominasi elit, partisipasi, transparansi

PENDAHULUAN

Demokrasi internal partai politik adalah aspek krusial yang menentukan kualitas sistem demokrasi dalam suatu negara. Di Indonesia, partai politik memainkan peran penting sebagai perwakilan kepentingan masyarakat dan penentu calon-calon yang akan maju dalam pemilihan umum. Menurut Amsari, setelah runtuhnya rezim Orde Baru dan munculnya Era Reformasi, Indonesia mulai mengadopsi sistem multipartai yang lebih plural. Hal ini menciptakan peluang besar bagi demokrasi, namun tantangan dalam demokrasi internal partai politik tetap ada. Pada praktiknya, banyak partai politik di Indonesia yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip demokrasi internal (Amsari, 2021). Meskipun regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Nomor 7 Tahun 2017, mengatur mengenai demokrasi internal, dominasi elite dan kurangnya partisipasi anggota tetap menjadi masalah utama yang menghambat implementasi demokrasi internal yang sejati (Juniar, 2021b).

Masalah demokrasi internal partai politik di Indonesia bisa dilihat dari proses rekrutmen dan seleksi kandidat yang sering kali tertutup dan didominasi oleh segelintir elite partai. Sebagai contoh, banyak partai masih bergantung pada satu figur kuat yang memiliki kendali besar dalam pengambilan keputusan strategis (Yunus, 2021). Ini menunjukkan adanya praktik oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada segelintir individu saja, dan anggota partai lainnya tidak memiliki peran yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan. Partai anggota partai memiliki akses yang sama terhadap informasi, yang pada akhirnya memungkinkan mereka untuk memantau dan mengevaluasi kinerja partai (Ignazi, 2020; McCoy et al., 2018). Seeberg menyatakan bahwa partai politik yang menerapkan transparansi dalam proses seleksinya cenderung memiliki kepercayaan yang lebih tinggi dari anggotanya. Di sisi lain, partai yang tertutup cenderung memunculkan rasa



ketidakpuasan karena anggotanya merasa tidak memiliki peran yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan. Ketidakpuasan ini dapat mendorong anggota untuk meninggalkan partai atau bahkan membentuk faksi-faksi yang dapat mengganggu stabilitas internal partai (Seeberg et al., 2018).

Partisipasi aktif dari anggota partai juga memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi internal (Kamenova, 2021). Partisipasi ini dapat diwujudkan melalui keterlibatan anggota dalam proses pemilihan internal, penyusunan program, serta diskusi mengenai kebijakan partai. Dalam partai politik yang demokratis, partisipasi anggota diakui dan dihargai sebagai bagian dari mekanisme pengambilan keputusan. Michels dalam teorinya mengenai "Hukum Besi Oligarki" menyebutkan bahwa organisasi besar cenderung dikelola oleh segelintir individu yang memiliki kekuasaan dominan. Namun, partai yang memberikan ruang partisipasi yang luas bagi anggotanya dapat menghindari kecenderungan oligarki tersebut, dengan memastikan bahwa semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan (Drochon, 2020).

Kurangnya demokrasi internal di partai politik memiliki dampak signifikan terhadap kualitas kandidat Calon Anggota DPRD yang dihasilkan. Ketika proses seleksi kandidat didominasi oleh elite partai, pemilihan kandidat sering kali didasarkan pada loyalitas politik daripada kompetensi dan integritas. Hal ini dapat mengurangi kualitas kandidat yang diajukan oleh partai, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas kepemimpinan yang dihasilkan oleh partai tersebut (Jiménez-Sánchez et al., 2018; Zakharov, 2016). Dalam penelitian oleh Juniar, disebutkan bahwa banyak partai di Indonesia masih menerapkan sistem seleksi kandidat yang tertutup, di mana anggota biasa tidak memiliki akses untuk ikut serta dalam proses seleksi. Dengan demikian, hanya kandidat yang memiliki hubungan baik dengan elite partai yang memiliki peluang untuk dipilih. Hal ini bukan hanya merugikan anggota partai yang kompeten, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap partai politik secara keseluruhan (Juniar, 2021).

Selain itu, praktik seleksi kandidat yang tidak demokratis dapat menciptakan peluang bagi individu yang tidak kompeten atau tidak berintegritas untuk mendapatkan posisi penting dalam partai. Ini pada akhirnya berdampak pada kualitas kepemimpinan yang dihasilkan oleh partai tersebut. Penelitian oleh Rahat menunjukkan bahwa partai yang tidak demokratis cenderung mengalami masalah dalam rekrutmen dan retensi kader yang berkualitas. Partai yang demokratis, di sisi lain, memiliki mekanisme yang lebih baik untuk memastikan bahwa hanya individu yang kompeten dan berintegritas yang dapat naik ke posisi kepemimpinan. Dengan demikian, partai politik yang menerapkan demokrasi internal dengan baik akan lebih mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan dipercaya oleh masyarakat (Borz & Janda, 2020).

Negara-negara seperti Inggris dan Korea Selatan telah menerapkan model demokrasi internal yang dapat menjadi referensi bagi partai politik di Indonesia. Di Inggris, partai politik seperti Partai Buruh dan Partai Konservatif telah mengadopsi mekanisme seleksi kandidat yang transparan dan partisipatif. Mereka memberikan kesempatan kepada anggota partai untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan kandidat, baik melalui pemilihan langsung maupun pemilihan konvensi. Selain itu, partai-partai ini juga menyediakan akses yang luas bagi anggota untuk terlibat dalam diskusi mengenai kebijakan partai. Dengan memberikan ruang partisipasi yang luas, partai-partai ini mampu menjaga kepercayaan anggotanya serta meningkatkan kualitas kandidat yang diajukan (Scarrow, 2005).

Korea Selatan juga menjadi contoh yang baik dalam penerapan demokrasi internal partai politik. Menurut (Borz & Janda, 2020), partai-partai di Korea Selatan secara aktif melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari pemilihan kandidat hingga penyusunan program partai. Partai-partai ini juga menerapkan sistem transparansi yang memungkinkan anggota untuk memantau kinerja partai dan memberikan masukan mengenai kebijakan yang diambil. Dengan demikian, partai politik di Korea Selatan mampu mempertahankan kepercayaan anggotanya serta meningkatkan kualitas kepemimpinan yang dihasilkan (Kim, 2021).



Pembelajaran dari negara-negara tersebut menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia perlu melakukan reformasi untuk memperkuat demokrasi internal mereka. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperluas akses partisipasi bagi anggota partai dalam proses seleksi kandidat. Selain itu, partai politik di Indonesia juga perlu meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga anggota partai memiliki akses yang lebih luas untuk memantau dan memberikan masukan. Dengan melakukan reformasi ini, partai politik di Indonesia tidak hanya akan mampu menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik sebagai institusi demokrasi.

Dalam upaya untuk memperkuat demokrasi internal partai politik di Indonesia, transparansi dan partisipasi anggota merupakan elemen kunci yang harus diperhatikan. Partai politik yang demokratis akan lebih mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas serta menjaga kepercayaan anggotanya. Pembelajaran dari negara lain menunjukkan bahwa demokrasi internal yang baik dapat dicapai melalui reformasi mekanisme seleksi kandidat dan peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, memperkuat demokrasi internal partai politik di Indonesia bukan hanya penting untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan, tetapi juga untuk memastikan bahwa partai politik dapat berfungsi sebagai instrumen demokrasi yang efektif.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan penelitian tentang evaluasi demokrasi internal partai politik di Indonesia untuk optimalisasi transparansi dan partisipasi sebagai salah satu cara mencegah oligarki. Dengan penelitian ini diharapkan akan ditemukan gambaran awal untuk menyusun model demokrasi internal partai politik di Indonesia yang ideal.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode legal research atau penelitian hukum, dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan (Irwansyah, 2022). Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara dengan informan kunci, yaitu anggota DPRD Kabupaten Banyumas dari partai PDIP, Gerindra, dan Golkar, yang memberikan wawasan mendalam terkait praktik transparansi dalam seleksi kandidat di partai politik mereka.

Pendekatan perundang-undangan difokuskan pada peninjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang merupakan dasar hukum utama dalam mengatur demokrasi internal partai politik, khususnya pada aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pencalonan pejabat publik. Dengan pendekatan ini, penelitian mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada mendukung pelaksanaan demokrasi internal yang lebih transparan dalam seleksi kandidat.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori yang relevan dengan demokrasi internal dan optimalisasi transparansi untuk mencegah dominasi elit atau oligarki dalam partai politik. Teori-teori ini membahas kecenderungan dominasi elit dalam organisasi besar serta pentingnya partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan sebagai dasar demokrasi internal. Melalui pendekatan konseptual ini, penelitian juga mengidentifikasi konsep transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai elemen penting yang harus dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas pemilu dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses seleksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Demokrasi Internal Partai Politik di Indonesia

Struktur demokrasi internal partai politik di Indonesia memainkan peran penting dalam menentukan kualitas demokrasi nasional secara keseluruhan. Demokrasi internal ini diartikan sebagai mekanisme dan prosedur yang diterapkan partai politik dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam pemilihan kepemimpinan, perumusan kebijakan, dan rekrutmen kandidat untuk pemilu. Berdasarkan Undang-Undang



Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, partai politik di Indonesia diharuskan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasinya. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 241 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyebutkan :

(1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

Namun, implementasinya sering kali menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan termasuk demokrasi internal dalam memilih Calon Anggota DPRD (Surbakti & Supriyanto, 2013). Kandidat anggota inilah yang nantinya akan dipilih oleh rakyat dalam Pemilu. Apabila demokrasi internal partai politik tidak berjalan dengan optimal, maka rakyat akan disuguhi calon yang bukan berasal dari proses politik yang demokratis di internal partai politik. (Juniar, 2021a)

Di dalam kebanyakan partai politik Indonesia, struktur demokrasi internal dirancang untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang kolektif. Pada tingkat dasar, partai politik memiliki cabang-cabang yang tersebar hingga ke tingkat kecamatan atau desa, yang berfungsi sebagai jaringan basis dukungan anggota partai. Dalam struktur ini, anggota partai di tingkat lokal memiliki hak untuk memilih pengurus partai pada tingkatan yang lebih tinggi melalui perwakilan. Namun, dalam praktiknya, pengaruh dari struktur akar rumput ini sering kali terbatas karena adanya kendali ketat oleh elite partai di tingkat pusat (Amsari, 2021; Seeberg et al., 2018). Di tingkat pusat, partai politik di Indonesia biasanya memiliki badan pengurus yang terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Kehormatan yang bertugas untuk mengawasi dan mengatur kebijakan serta keputusan strategis partai. Badan ini sering kali didominasi oleh segelintir individu yang memiliki kekuasaan besar dalam memengaruhi keputusan partai. Hal ini menciptakan lingkungan di mana keputusan-keputusan penting, seperti pemilihan kandidat, perumusan platform kebijakan, dan penunjukan pejabat partai, dapat dikendalikan oleh elit partai tanpa keterlibatan luas dari anggota biasa (Böhmelt et al., 2022).

Di samping struktur organisasi, demokrasi internal juga dipengaruhi oleh AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) partai politik. AD/ART seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dengan menetapkan aturan yang mengatur pemilihan pengurus, hak suara anggota, dan mekanisme pengambilan keputusan. Namun, banyak AD/ART partai di Indonesia masih mengandung celah yang memungkinkan elite partai untuk mempertahankan kekuasaan dan mengontrol proses secara tertutup. Dalam beberapa kasus, keputusan penting bahkan diambil oleh segelintir elite partai melalui mekanisme yang tidak transparan atau tertutup (Perludem, 2017).

Struktur demokrasi internal di banyak partai politik di Indonesia masih jauh dari ideal karena kurangnya transparansi dan partisipasi yang efektif dari anggota partai di tingkat akar rumput. Sebagai contoh, dalam proses pemilihan kandidat untuk pemilu, mayoritas partai politik di Indonesia lebih mengandalkan seleksi tertutup di tingkat pusat tanpa melibatkan anggota partai secara luas. Sebuah studi oleh Perludem menunjukkan bahwa pada Pemilu 2019, proses seleksi kandidat di banyak partai besar cenderung tertutup, di mana anggota partai lokal dan masyarakat umum tidak memiliki akses untuk memantau atau berpartisipasi dalam proses ini (Juniar, 2021a).

Kendala ini menunjukkan bahwa meskipun secara struktur partai politik di Indonesia didesain untuk mendukung prinsip demokrasi internal, implementasi dan praktiknya sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang ideal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural untuk memastikan bahwa partai politik di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai mesin pemilihan, tetapi juga sebagai institusi demokratis yang memberikan ruang bagi anggotanya untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan politik (Sete, 2018).



Di Indonesia, meskipun ada peraturan yang mengharuskan partai politik melakukan seleksi kandidat secara demokratis, praktik di lapangan sering kali berbeda. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Fraksi PDIP, Golkar, dan Gerindra, terlihat bahwa dominasi elit partai tetap mendominasi proses seleksi. Praktik seleksi kandidat di partai-partai besar ini masih terkesan tertutup, dengan keterlibatan terbatas dari anggota partai. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengatur agar proses seleksi dilakukan secara transparan, kenyataannya masih banyak partai yang mengabaikan aspek keterbukaan tersebut. Sebagai contoh, keputusan akhir mengenai kandidat lebih sering diambil oleh elite partai, sementara anggota partai di tingkat akar rumput hanya sedikit terlibat dalam proses ini. Kurangnya transparansi ini menciptakan celah bagi praktik oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil individu di dalam partai.

Menurut teori keterbukaan institusional oleh Fukuyama, transparansi memungkinkan pemantauan yang lebih efektif dari pihak internal dan eksternal. Transparansi tidak hanya memengaruhi persepsi anggota partai, tetapi juga publik secara luas (Fukuyama, 2014). Dalam hal ini, Bovens menekankan pentingnya transparansi untuk memastikan akuntabilitas, yang merupakan elemen esensial dalam demokrasi (Bovens, 2010). Namun, di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik lebih cenderung menerapkan mekanisme tertutup dalam seleksi kandidat. Seperti yang terlihat dalam wawancara bahwa salah satu faktor penentu dalam seleksi kandidat didasarkan pada kedekatan dengan elit partai serta kemampuan finansial kandidat untuk mendanai kampanye. Hal ini tidak hanya mengurangi kualitas kandidat yang dipilih, tetapi juga memperburuk persepsi publik tentang integritas partai politik.

Salah satu masalah utama dalam demokrasi internal partai politik di Indonesia adalah dominasi elite. Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa keputusan seleksi kandidat sering kali diambil oleh segelintir pemimpin partai yang memiliki otoritas penuh. Hal ini sejalan dengan teori oligarki oleh Michels, yang menyatakan bahwa organisasi besar, termasuk partai politik, cenderung dikendalikan oleh elite yang memiliki kekuasaan dominan. Michels juga menunjukkan bahwa oligarki mengancam demokrasi internal karena elite akan selalu berusaha mempertahankan kekuasaannya, bahkan dengan mengorbankan prinsip demokrasi (Drochon, 2020; Nikulin, 2023). Hasil wawancara menunjukkan bahwa seleksi kandidat lebih diprioritaskan kepada mereka yang memiliki hubungan dekat dengan elit partai. Dalam jangka panjang, dominasi elite ini menghambat partisipasi anggota dan menciptakan kesenjangan representasi, di mana suara dari anggota partai yang lebih luas menjadi tidak terdengar.

Kurangnya transparansi dalam proses seleksi kandidat memiliki dampak langsung terhadap kualitas kandidat yang dipilih. Berdasarkan wawancara dengan Fraksi Gerindra, terlihat bahwa kandidat sering kali dipilih bukan karena kompetensi atau kapabilitasnya, melainkan karena loyalitas dan kemampuan finansial mereka. Winters (2013) menyoroti bahwa ketika proses seleksi kandidat tidak transparan, kualitas kandidat yang dipilih cenderung rendah. Hal ini terjadi karena kriteria seleksi lebih menitikberatkan pada loyalitas terhadap elit partai daripada pada kompetensi dan integritas kandidat. Dalam kasus Fraksi PDIP, loyalitas terhadap pimpinan partai menjadi kriteria utama dalam memilih kandidat, yang berarti bahwa kandidat yang kompeten namun kurang dekat dengan elit partai memiliki peluang yang lebih kecil untuk dipilih. Dengan demikian, kurangnya transparansi tidak hanya merugikan anggota partai yang lebih luas tetapi juga mengurangi peluang untuk memilih kandidat yang benar-benar kompeten.

Salah satu prinsip utama dalam demokrasi internal adalah partisipasi anggota. Berdasarkan teori demokrasi partisipatif yang dikemukakan oleh Dahl, setiap anggota organisasi seharusnya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Forbes, 2017; Moon, 1972). Namun, di Indonesia, partisipasi anggota dalam seleksi kandidat sering kali terbatas. Berdasarkan wawancara terlihat bahwa proses seleksi kandidat didominasi oleh elite partai, dengan keterlibatan anggota yang sangat minim. Hal ini menunjukkan bahwa partai-partai politik di Indonesia cenderung menerapkan model oligarki Michels, di mana kekuasaan terpusat pada segelintir orang. Dalam teori ini, organisasi besar cenderung dikelola oleh segelintir individu



yang memiliki kekuasaan dominan, yang pada akhirnya menghambat partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan penting (Michels, 2019).

Dominasi Elite dan Implikasinya terhadap Demokrasi Internal

Terdapat dua aliran utama yang mempengaruhi pandangan mengenai bagaimana partai politik seharusnya dikelola. Pandangan liberal menganggap partai politik sebagai asosiasi privat yang berhak mengatur dirinya sendiri tanpa intervensi dari luar. Menurut pandangan ini, kebebasan internal adalah hal utama karena partai politik adalah bentuk dari hak berserikat dan berkompetisi secara bebas dalam politik. Di sisi lain, teori institusional memandang partai politik sebagai entitas publik yang memiliki tanggung jawab sosial untuk beroperasi secara demokratis, termasuk dalam hal seleksi kandidat (Campati, 2022; Freedon et al., 2013).

Dalam konteks Indonesia, partai politik berfungsi sebagai jembatan antara negara dan masyarakat, serta sebagai sarana bagi warga untuk berpartisipasi dalam politik. Karena peran ini, partai politik diharapkan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi internal yang tidak hanya mencakup hak anggota untuk berpartisipasi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai representasi yang adil dan responsif terhadap kebutuhan anggota dan masyarakat luas (Surbakti & Supriyanto, 2013). Dominasi elit dalam partai politik sering dijelaskan melalui konsep "Hukum Besi Oligarki" oleh Robert Michels. Menurut Michels, organisasi politik besar cenderung dikuasai oleh segelintir elite yang berkuasa dan memperkuat posisi mereka. Meskipun organisasi politik seperti partai pada awalnya mungkin memiliki tujuan demokratis, tetapi pada akhirnya, mereka dikendalikan oleh sekelompok kecil pemimpin yang memonopoli kekuasaan dan cenderung mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pribadi mereka. Dalam bukunya, Susan Scarrow menyoroti pentingnya demokrasi internal untuk memastikan bahwa partai politik dapat memenuhi peran mereka dalam demokrasi representatif. Scarrow menyatakan bahwa partai politik yang demokratis seharusnya mengartikulasikan aspirasi anggotanya, memfasilitasi kepemimpinan politik, dan menyediakan alternatif kebijakan yang mewakili berbagai kepentingan di masyarakat. Namun, partai politik yang dikuasai oleh elite cenderung meminggirkan suara anggota yang lebih luas demi menjaga kontrol atas kekuasaan (Sarrow, 2021).

Pada hasil wawancara mengungkapkan bahwa pemimpin partai yang berpengaruh cenderung memutuskan kandidat berdasarkan kedekatan pribadi dan loyalitas, alih-alih mempertimbangkan masukan dari anggota partai yang lebih luas. Praktik ini mengurangi kesempatan partisipasi dan membuat anggota merasa bahwa suara mereka tidak dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Teori Scarrow menunjukkan bahwa hal ini tidak hanya melemahkan demokrasi internal, tetapi juga mengurangi legitimasi partai di mata publik

Jeffrey Winters memperkenalkan konsep oligarki yang menyatakan bahwa kekuasaan politik cenderung terkonsentrasi pada sekelompok kecil individu kaya atau berpengaruh yang mendominasi keputusan politik. Dalam konteks partai politik, dominasi elit ini terlihat dalam kontrol ketat yang mereka miliki terhadap proses seleksi kandidat dan distribusi sumber daya. Menurut Winters, oligarki adalah ancaman serius terhadap demokrasi karena mengurangi peluang partisipasi dan akses terhadap kekuasaan bagi mayoritas anggota. Wawancara menunjukkan bahwa keputusan terkait kandidat sering kali berdasarkan kemampuan finansial kandidat untuk mendukung kampanye partai. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya elite yang mengontrol partai, tetapi juga kekayaan yang memengaruhi siapa yang memiliki akses ke posisi penting. Ini mengindikasikan bahwa kekuatan oligarki di partai-partai Indonesia bukan hanya tentang dominasi politik, tetapi juga tentang kontrol ekonomi yang memengaruhi siapa yang bisa maju sebagai kandidat.

Dominasi elite dalam partai politik di Indonesia memiliki beberapa implikasi serius terhadap demokrasi internal. Pertama, hal ini mengurangi partisipasi anggota dan menciptakan kesenjangan dalam representasi. Dalam teori demokrasi partisipatif yang dikemukakan oleh Dahl, partisipasi adalah elemen penting yang memungkinkan semua anggota berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Namun, di Indonesia,



keputusan terkait kandidat sering kali diambil oleh segelintir pemimpin yang memiliki kekuasaan besar, yang berarti suara anggota biasa sering kali tidak didengar. Kedua, dominasi elite melemahkan akuntabilitas. Menurut teori akuntabilitas oleh Bovens, transparansi dalam pengambilan keputusan penting untuk memastikan bahwa organisasi dapat dipertanggungjawabkan kepada anggotanya. Akan tetapi, karena elite di partai politik Indonesia memiliki kontrol penuh atas proses seleksi kandidat, tidak ada mekanisme yang memastikan mereka mempertanggungjawabkan keputusan mereka kepada anggota yang lebih luas. Anggota di tingkat bawah sering kali tidak mengetahui alasan di balik keputusan seleksi kandidat, yang menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan teori-teori yang relevan, ada beberapa rekomendasi untuk mengatasi dominasi elite dalam partai politik di Indonesia. Pertama, perlu adanya reformasi dalam AD/ART partai untuk memasukkan prosedur demokratis yang melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan penting, terutama dalam seleksi kandidat. Dengan demikian, partai dapat mengurangi kekuasaan elite dan memberikan kesempatan kepada anggota yang lebih luas untuk berpartisipasi.

Kedua, diperlukan intervensi negara untuk memastikan bahwa partai politik memenuhi standar minimum demokrasi internal. Sebagai organisasi publik yang bertanggung jawab kepada masyarakat, partai politik seharusnya diatur untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini bisa dilakukan dengan mewajibkan partai untuk melaporkan proses seleksi kandidat dan memastikan bahwa prosedur tersebut memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi yang tinggi.

Ketiga, meningkatkan pendidikan politik bagi anggota partai untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak mereka dalam partai. Dengan memahami hak-hak mereka, anggota partai dapat lebih aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dan menuntut transparansi dari elite yang berkuasa.

Dominasi elite dalam partai politik di Indonesia menghambat pelaksanaan demokrasi internal dan mengurangi legitimasi partai di mata publik. Teori-teori yang dibahas, mulai dari Hukum Besi Oligarki Michels hingga konsep oligarki Winters, menunjukkan bahwa partai politik cenderung dikuasai oleh sekelompok kecil pemimpin yang memperkuat posisi mereka. Untuk memperkuat demokrasi di Indonesia, reformasi dalam partai politik diperlukan agar partai dapat menjadi wadah yang benar-benar demokratis dan akuntabel bagi anggotanya

Dampak Kurangnya Transparansi dalam Seleksi Kandidat terhadap Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat

Transparansi dalam seleksi kandidat merupakan prinsip fundamental yang menentukan kualitas demokrasi internal partai politik. Proses yang terbuka dan akuntabel sangat penting agar anggota partai dan publik dapat memahami bagaimana kandidat dipilih dan siapa yang akan mewakili kepentingan mereka. Transparansi tidak hanya berfungsi sebagai jaminan terhadap keadilan, tetapi juga sebagai mekanisme yang mencegah dominasi elit dalam pengambilan keputusan. Ketika proses seleksi tidak transparan, ada risiko besar bahwa kandidat yang terpilih tidak akan benar-benar mewakili kepentingan publik atau bahkan anggota partai itu sendiri.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Fraksi PDIP, Golkar, dan Gerindra, terlihat bahwa proses seleksi kandidat sering kali hanya melibatkan segelintir elite partai, sementara anggota biasa hanya memiliki sedikit, jika ada, pengaruh dalam proses ini. Hal ini sejalan dengan teori oligarki Michels yang menyatakan bahwa organisasi besar seperti partai politik cenderung dikuasai oleh elite yang mengendalikan proses pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan mereka. Akibatnya, transparansi dalam seleksi kandidat tidak tercapai, dan kesempatan untuk memilih kandidat yang berkompeten dan representatif bagi masyarakat semakin berkurang. Ketertutupan dalam proses seleksi kandidat berdampak langsung pada kualitas demokrasi di dalam partai dan secara lebih luas, di seluruh sistem politik. Hazan dan Rahat menekankan bahwa metode seleksi kandidat adalah indikator utama dari kualitas demokrasi internal. Proses seleksi kandidat yang tidak transparan dapat mengarah pada berkurangnya legitimasi dan kepercayaan publik



terhadap partai, karena publik tidak memiliki akses atau pemahaman mengenai kriteria dan prosedur yang digunakan (Hazan & Rahat, 2010).

Dalam teori demokrasi partisipatif oleh Dahl partisipasi aktif anggota adalah esensi dari demokrasi yang sejati. Namun, di partai-partai politik di Indonesia, partisipasi ini sering kali tidak terwujud. Data menunjukkan bahwa proses seleksi kandidat dilakukan secara tertutup dan keputusan berada sepenuhnya di tangan elit partai. Ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan anggota dan dapat merusak semangat demokrasi internal, karena anggota merasa suara mereka tidak dihargai dalam proses yang menentukan masa depan partai dan pada akhirnya, negara

Sistem pemilu di Indonesia, yang mengadopsi sistem perwakilan proporsional, berpengaruh signifikan terhadap transparansi dalam seleksi kandidat. Sistem ini memberikan partai politik wewenang penuh untuk menentukan urutan calon legislatif di setiap daerah pemilihan. Berdasarkan hasil wawancara sistem proporsional terbuka dapat mengurangi insentif bagi partai untuk menerapkan transparansi, karena fokus partai lebih banyak pada memenangkan kursi daripada pada proses yang demokratis dan inklusif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor finansial menjadi salah satu kriteria utama dalam pemilihan kandidat, yang menunjukkan bahwa sistem pemilu memperkuat kecenderungan elit untuk memprioritaskan kandidat dengan modal besar ketimbang yang memiliki kompetensi dan integritas. Sistem pemilu tidak memberikan insentif yang cukup bagi partai politik untuk memperbaiki transparansi dalam seleksi kandidat mereka. Sebaliknya, partai cenderung mengutamakan faktor-faktor yang berkaitan dengan daya saing elektoral daripada keterbukaan dalam proses seleksi.

Kualitas kandidat yang terpilih melalui proses seleksi yang tidak transparan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat (Sunggara et al., 2024). Kandidat yang dipilih berdasarkan kedekatan dengan elit atau kemampuan finansial cenderung lebih berorientasi pada kepentingan pribadi dan kelompok daripada kepentingan masyarakat luas. Di Indonesia, kandidat-kandidat yang terpilih melalui proses yang tidak transparan sering kali tidak memiliki keterampilan atau komitmen yang diperlukan untuk mendorong perubahan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat

Hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu dampak kurangnya transparansi adalah rendahnya kualitas perwakilan rakyat yang dihasilkan. Ketika kandidat tidak dipilih berdasarkan kompetensi, mereka sering kali kurang mampu untuk memperjuangkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan rakyat. Hal ini juga menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap wakil rakyat, karena masyarakat merasa bahwa wakil yang terpilih tidak benar-benar mewakili kepentingan mereka.

Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memperkenalkan mekanisme seleksi yang lebih terbuka, yang melibatkan anggota partai dan bahkan masyarakat secara lebih luas. Fung menyarankan bahwa transparansi dapat ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak aktor dalam proses seleksi, termasuk melalui pemilihan pendahuluan (*primary election*) di mana seluruh anggota partai dapat berpartisipasi. Hal ini dapat mengurangi dominasi elit dan memastikan bahwa kandidat dipilih berdasarkan kompetensi dan dukungan yang luas dari anggota partai (Fung, 2020; Fung & Wright, 2001). Selain itu, partai politik perlu melakukan pelaporan publik yang lebih komprehensif mengenai kriteria dan prosedur seleksi kandidat. Langkah ini akan meningkatkan akuntabilitas partai dan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi internal yang mereka jalankan. Hal ini sesuai dengan rekomendasi dari Scarrow yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan keterbukaan informasi untuk membangun kepercayaan publik dalam demokrasi perwakilan modern (Webb et al., 2022).

Kurangnya transparansi dalam seleksi kandidat partai politik di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Sistem pemilu perwakilan proporsional saat ini memberikan ruang bagi partai politik untuk lebih memprioritaskan kemenangan elektoral daripada proses seleksi yang demokratis. Hal ini diperparah dengan dominasi elit yang sering kali memilih kandidat berdasarkan kedekatan dan kemampuan finansial, daripada kompetensi dan komitmen pada kepentingan



publik. Untuk memperkuat demokrasi internal dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, partai politik perlu memperbaiki mekanisme seleksi mereka dengan menekankan pada transparansi dan partisipasi anggota partai

Perbandingan dengan Negara Lain dan Pembelajaran untuk Indonesia

Demokrasi internal partai politik di Ethiopia dan Jerman menggambarkan perbedaan mendasar dalam pendekatan mereka terhadap keterlibatan anggota partai dan pengambilan keputusan. Ethiopia, sebagai negara dengan sejarah politik yang berfokus pada kontrol elit, menghadapi tantangan besar dalam menerapkan demokrasi internal di dalam partai politik. Struktur partai politik di Ethiopia, khususnya Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (EPRDF), sangat sentralistik dengan kekuasaan yang tersentralisasi pada pimpinan partai. Hal ini menyebabkan anggota di tingkat bawah memiliki sedikit kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses seleksi kandidat. Meskipun ada upaya reformasi yang mengupayakan pelibatan anggota, kenyataannya adalah bahwa proses seleksi masih didominasi oleh elit. Dominasi elit di Ethiopia menciptakan jarak yang lebar antara aspirasi anggota partai dan keputusan yang diambil oleh pimpinan (Rohrbach, 2021).

Sejak berakhirnya kekuasaan EPRDF dan munculnya Partai Kemakmuran (Prosperity Party), Ethiopia telah mencoba untuk mendorong partisipasi yang lebih luas. Namun, eksperimen-eksperimen demokratis ini masih terhambat oleh pengaruh kuat para elit dan struktur politik yang kurang transparan. Akibatnya, meskipun ada upaya untuk meningkatkan partisipasi anggota, partai politik di Ethiopia masih belum mampu mengimplementasikan demokrasi internal yang inklusif secara konsisten (Aytaged, 2024).

Sebaliknya, di Jerman, demokrasi internal partai politik lebih berkembang dan transparan, dengan pelibatan langsung anggota dalam pengambilan keputusan. Partai-partai besar seperti CDU (Christian Democratic Union) dan SPD (Social Democratic Party of Germany) telah menerapkan mekanisme yang memungkinkan anggota partai memilih kandidat dan pemimpin partai secara langsung. Dalam model ini, anggota partai berpartisipasi melalui pemilihan pendahuluan serta konvensi partai yang demokratis, di mana suara mereka menentukan keputusan penting, termasuk siapa yang akan menjadi kandidat utama. Susan Scarrow, dalam penelitiannya, menggarisbawahi bahwa partisipasi anggota dalam proses seleksi kandidat tidak hanya memperkuat legitimasi partai tetapi juga meningkatkan keterikatan antara anggota dan kebijakan partai (Cross & Katz, 2013).

Jerman menggunakan sistem yang memastikan aspirasi anggota partai diperhitungkan dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Hal ini memungkinkan partai-partai Jerman untuk tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan anggotanya, sebuah pendekatan yang mungkin dapat diadaptasi oleh negara-negara lain yang menghadapi tantangan dalam demokrasi internal partai politik, seperti Indonesia. Pendekatan ini menawarkan pelajaran penting bagi negara-negara yang masih bergulat dengan dominasi elit dan kurangnya keterlibatan anggota dalam proses demokrasi internal partai

Indonesia dapat belajar banyak dari perbandingan praktik demokrasi internal partai politik di Ethiopia dan Jerman. Salah satu tantangan utama bagi Indonesia adalah dominasi elit dalam proses seleksi kandidat, yang mengakibatkan rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Praktik di Ethiopia menunjukkan bahwa dominasi elit dapat membatasi partisipasi dan menghambat demokrasi internal, yang menjadi ancaman bagi kualitas representasi publik. Sebaliknya, model Jerman yang lebih terbuka dan partisipatif menawarkan alternatif yang dapat diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan demokrasi internal. Berikut adalah beberapa pembelajaran yang relevan bagi Indonesia:

1. Penerapan Pemilihan Pendahuluan (Primary Election): Jerman memberikan contoh bagaimana pemilihan pendahuluan dapat digunakan untuk melibatkan anggota partai secara lebih luas. Dengan melibatkan anggota dalam seleksi kandidat melalui pemilihan pendahuluan, partai di Indonesia dapat mengurangi dominasi elit dan memastikan bahwa kandidat yang terpilih benar-benar mencerminkan aspirasi



anggota partai. Hal ini sesuai dengan pendapat Scarrow yang menekankan pentingnya partisipasi langsung untuk memperkuat demokrasi internal .

2. Desentralisasi Kekuasaan dalam Struktur Partai: Struktur yang lebih desentralisasi seperti di Jerman dapat menjadi solusi bagi partai-partai di Indonesia yang cenderung terpusat. Dengan desentralisasi, anggota partai di tingkat daerah memiliki lebih banyak kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting, termasuk seleksi kandidat. Hal ini dapat menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan keterikatan anggota dengan partai.

3. Penguatan Kerangka Regulasi: Meski Indonesia telah memiliki peraturan tentang partai politik, implementasi dan pengawasan masih perlu diperkuat. Ethiopia menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang kuat, dominasi elit cenderung meningkat. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat regulasi yang mengatur seleksi kandidat untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel. Keterlibatan lembaga pengawas seperti KPU dalam memantau proses seleksi kandidat di dalam partai politik dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat demokrasi internal.

4. Kultur Partisipatif dan Transparansi: Jerman juga menunjukkan bahwa demokrasi internal yang kuat berakar pada kultur partisipatif dan transparan dalam partai politik. Indonesia perlu mengembangkan kultur serupa dengan mendorong partai politik untuk membuka akses informasi dan memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyuarakan pandangan mereka dalam proses seleksi kandidat. Penerapan sistem yang transparan dapat mengurangi risiko oligarki dan meningkatkan akuntabilitas partai terhadap anggotanya.

Berdasarkan pembelajaran tersebut, beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya adalah :

1. Reformasi AD/ART Partai: Mengacu pada praktik di Jerman, partai politik di Indonesia dapat melakukan reformasi pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) untuk menjamin hak anggota berpartisipasi dalam proses seleksi kandidat. AD/ART yang mendukung keterlibatan anggota secara luas akan meningkatkan demokrasi internal dan mengurangi kekuasaan elit.

2. Program Pendidikan Politik: Belajar dari tantangan di Ethiopia, partai politik di Indonesia perlu memperkuat program pendidikan politik bagi anggotanya. Pendidikan politik yang baik akan mempersiapkan anggota partai untuk berpartisipasi aktif dan kritis dalam proses seleksi kandidat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas demokrasi internal.

3. Audit dan Evaluasi Rutin oleh Lembaga Independen: Meniru pengawasan ketat yang dilakukan di Jerman, partai politik di Indonesia dapat menerapkan audit dan evaluasi rutin terhadap proses seleksi kandidat oleh lembaga independen. Hal ini akan memastikan bahwa proses seleksi berjalan sesuai dengan standar transparansi yang diharapkan dan melibatkan anggota secara luas.

Dengan mengadaptasi praktik-praktik dari Jerman, yang telah berhasil membangun demokrasi internal yang kuat, serta menghindari kesalahan yang dialami oleh Ethiopia, partai politik di Indonesia dapat memperkuat struktur internal mereka dan meningkatkan legitimasi di mata publik. Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas adalah kunci untuk memperbaiki demokrasi internal partai politik di Indonesia, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas representasi politik dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Transparansi dalam Seleksi Kandidat

Untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam seleksi kandidat Calon Anggota DPR atau DPRD dapat dilakukan beberapa hal berikut ini :

1. Implementasi Mekanisme Pemilihan Pendahuluan (Primary Election)

Mekanisme pemilihan pendahuluan atau primary election dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan transparansi dalam seleksi kandidat partai politik di Indonesia. Sistem ini memungkinkan seluruh anggota partai, atau bahkan konstituen yang lebih luas, untuk berpartisipasi langsung dalam memilih kandidat yang akan diusung dalam pemilihan umum. Dalam wawancara dengan anggota Fraksi PDIP dan



Gerindra, terungkap bahwa keputusan kandidat sering kali hanya melibatkan elit partai, yang mengakibatkan kurangnya keterlibatan anggota di tingkat akar rumput .

Mekanisme primary election yang mengikutsertakan anggota partai dalam proses seleksi kandidat dapat mengurangi dominasi elit, karena keputusan tidak hanya berada di tangan segelintir pemimpin partai. Selain itu, primary election juga memberikan kesempatan bagi anggota partai untuk menentukan siapa yang menurut mereka paling layak untuk mewakili partai dalam pemilihan umum. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Scarrow (2015), sistem pemilihan pendahuluan dapat meningkatkan keterlibatan anggota partai dan memperkuat demokrasi internal. Jika diterapkan, partai politik di Indonesia dapat mengurangi kesenjangan antara elit partai dan anggota biasa, serta meningkatkan rasa memiliki terhadap keputusan yang diambil.

2. Transparansi dalam Kriteria dan Prosedur Seleksi Kandidat

Salah satu cara yang sangat efektif untuk meningkatkan transparansi adalah dengan membuka kriteria dan prosedur seleksi kandidat kepada publik. Menurut Fung, keterbukaan informasi adalah kunci untuk meningkatkan akuntabilitas dalam proses seleksi. Dengan adanya standar kriteria yang dipublikasikan secara terbuka, partai politik dapat membangun kepercayaan publik terhadap integritas proses seleksi. Di Indonesia, proses seleksi kandidat sering kali tidak terbuka bagi publik, sehingga menimbulkan persepsi bahwa kandidat dipilih berdasarkan kedekatan pribadi dengan elite partai atau kemampuan finansial mereka

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa kriteria seleksi kandidat sering kali tidak dipublikasikan atau bahkan tidak terdokumentasi secara formal. Hal ini menciptakan ketidakjelasan bagi anggota partai dan publik yang tidak mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi keputusan tersebut. Untuk memperbaiki hal ini, partai politik sebaiknya mengembangkan dan mempublikasikan kriteria seleksi yang jelas dan terukur, seperti integritas, rekam jejak, kompetensi, dan komitmen pada kepentingan publik. Dengan demikian, partai tidak hanya akan memperkuat transparansi, tetapi juga memperlihatkan komitmen mereka terhadap demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif.

3. Pengawasan Eksternal oleh Lembaga Independen

Pengawasan eksternal oleh lembaga independen seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau lembaga lain yang berkepentingan dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa proses seleksi kandidat dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Di banyak negara, lembaga pemilu memiliki wewenang untuk memantau dan menilai prosedur seleksi kandidat yang dilakukan oleh partai politik, untuk memastikan bahwa partai mematuhi standar minimum transparansi dan akuntabilitas.

Di Indonesia, KPU memiliki wewenang yang cukup luas dalam mengawasi pemilu, tetapi pengawasan terhadap proses seleksi internal partai politik masih terbatas. Dalam wawancara dengan Fraksi PDIP, ditemukan bahwa elit partai sering kali membuat keputusan secara tertutup, tanpa adanya pengawasan atau evaluasi dari pihak luar. Penerapan pengawasan eksternal dapat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa proses seleksi tidak hanya dilakukan sesuai prosedur, tetapi juga mencerminkan komitmen partai terhadap transparansi dan demokrasi internal

4. Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Kesadaran Anggota Partai

Pendidikan politik yang berkelanjutan bagi anggota partai dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak mereka dalam proses demokrasi internal. Winters mencatat bahwa salah satu alasan mengapa oligarki dapat bertahan adalah karena rendahnya kesadaran dan pemahaman anggota partai mengenai hak mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Faisal & Triswidodo, 2024; Muhajir & Wulandari, 2023). Di Indonesia, pendidikan politik belum sepenuhnya menjadi prioritas bagi partai politik. Dengan memberikan pendidikan politik yang memadai, partai dapat membekali anggotanya dengan pengetahuan yang mereka perlukan untuk lebih aktif terlibat dan menuntut transparansi dalam seleksi kandidat.



Anggota partai yang memiliki kesadaran politik yang tinggi akan lebih cenderung menuntut partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam wawancara terlihat bahwa anggota partai sering kali merasa tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi keputusan karena kurangnya pemahaman tentang hak mereka. Pendidikan politik yang berkelanjutan dapat membantu mengatasi masalah ini dengan memberikan anggota partai alat dan pengetahuan yang mereka perlukan untuk berpartisipasi secara aktif dan menuntut akuntabilitas dari elit partai.

5. Pelaporan dan Audit Internal secara Berkala

Pelaporan dan audit internal adalah mekanisme yang sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi kandidat. Partai politik di Indonesia sebaiknya melakukan pelaporan secara berkala mengenai proses seleksi kandidat mereka dan mempublikasikan laporan tersebut kepada anggota partai dan masyarakat. Selain itu, audit internal dapat membantu memastikan bahwa semua keputusan yang diambil sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan tidak ada manipulasi atau penyimpangan yang terjadi dalam proses seleksi. Pelaporan dan audit internal dapat dilakukan oleh komite independen yang terdiri dari anggota partai yang tidak memiliki konflik kepentingan dalam proses seleksi. Dengan melibatkan anggota partai dalam pengawasan internal, partai dapat memastikan bahwa proses seleksi kandidat tidak hanya transparan, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diharapkan. Hasil audit internal juga dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan proses seleksi di masa mendatang, sehingga partai politik dapat terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas mereka.

6. Meningkatkan Partisipasi Publik Melalui Forum Terbuka

Forum terbuka dapat menjadi sarana bagi partai politik untuk mendengarkan masukan dari anggota partai dan publik tentang kandidat yang akan dipilih. Melalui forum ini, partai dapat menyaring aspirasi anggota dan memberikan penjelasan tentang kriteria yang digunakan dalam seleksi kandidat. Menurut teori demokrasi deliberatif, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan penting untuk memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dalam wawancara terlihat bahwa banyak anggota partai yang merasa tidak memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai kandidat yang diusung. Forum terbuka dapat menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi dan transparansi, dengan memberikan anggota partai ruang untuk berbicara dan mendiskusikan kandidat yang mereka dukung. Selain itu, forum terbuka juga dapat digunakan sebagai sarana edukasi politik, di mana anggota partai dapat belajar lebih banyak tentang proses seleksi kandidat dan prinsip-prinsip demokrasi internal.

Meningkatkan transparansi dalam seleksi kandidat adalah langkah penting untuk memperkuat demokrasi internal partai politik di Indonesia. Dengan menerapkan mekanisme seperti primary election, membuka kriteria seleksi, memperkuat pengawasan eksternal, meningkatkan pendidikan politik, melakukan audit internal, dan membentuk forum terbuka, partai politik dapat memastikan bahwa proses seleksi mereka lebih demokratis dan akuntabel. Langkah-langkah ini tidak hanya akan mengurangi dominasi elit, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam sistem demokrasi.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam seleksi kandidat partai politik di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Dominasi elite partai dalam proses pengambilan keputusan mengakibatkan rendahnya partisipasi anggota dan terbatasnya akses terhadap informasi, yang pada akhirnya memperkuat kecenderungan oligarki dalam partai politik. Sistem pemilu yang ada, yang mengadopsi sistem perwakilan proporsional, turut mempengaruhi proses seleksi kandidat dengan memprioritaskan kandidat yang dianggap berpotensi memenangkan kursi tanpa mempertimbangkan keterbukaan dan akuntabilitas.



Transparansi yang rendah dalam seleksi kandidat tidak hanya melemahkan demokrasi internal partai, tetapi juga berdampak pada kualitas kandidat yang dipilih, yang kemudian berimbas pada kualitas perwakilan dan kesejahteraan publik. Proses seleksi yang cenderung didasarkan pada loyalitas dan kedekatan dengan elit partai atau kemampuan finansial mengabaikan faktor kompetensi dan integritas kandidat. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan kurang mampu merefleksikan kepentingan publik secara menyeluruh, dan masyarakat menjadi skeptis terhadap legitimasi partai politik sebagai instrumen demokrasi.

Berdasarkan hal tersebut, beberapa rekomendasi diajukan untuk meningkatkan transparansi dan memperkuat demokrasi internal dalam seleksi kandidat partai politik di Indonesia:

1. Penerapan Primary Election: Partai politik harus mempertimbangkan penerapan mekanisme primary election yang memungkinkan anggota partai untuk berpartisipasi langsung dalam pemilihan kandidat. Langkah ini akan mengurangi dominasi elit dan memberikan suara kepada anggota partai dalam pengambilan keputusan.

2. Publikasi Kriteria dan Prosedur Seleksi: Partai politik perlu mengembangkan dan mempublikasikan kriteria seleksi kandidat yang jelas dan objektif, sehingga semua anggota dan publik mengetahui bagaimana kandidat dipilih. Ini akan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap proses seleksi.

3. Pengawasan Eksternal oleh KPU: Diperlukan pengawasan eksternal oleh lembaga independen, seperti KPU, untuk memastikan bahwa proses seleksi kandidat dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

4. Pendidikan Politik untuk Anggota Partai: Partai politik harus menyediakan pendidikan politik yang berkelanjutan bagi anggotanya untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai hak-hak mereka dalam proses demokrasi internal, yang pada akhirnya akan mendorong keterlibatan aktif anggota dalam proses seleksi kandidat.

5. Audit Internal dan Forum Terbuka: Melakukan audit internal secara berkala serta membuka forum diskusi bagi anggota partai akan memastikan bahwa proses seleksi dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan memungkinkan anggota untuk memberikan masukan serta mengawasi pengambilan keputusan.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan partai politik di Indonesia dapat memperkuat demokrasi internal mereka, mengurangi dominasi elit, dan memilih kandidat yang benar-benar kompeten dan mewakili kepentingan publik. Transparansi yang lebih baik dalam seleksi kandidat juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik, sehingga berkontribusi pada penguatan demokrasi dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsari, F. (2021). Designing an Intra Party Democracy in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(4), 1–10.
- Aytaged, N. A. (2024). The Party System in Ethiopia: Its Impact on the Federal Dispensation and Intergovernmental Relations. *Africa Review*, 16(2), 113–135.
- Böhmelt, T., Ezrow, L., & Lehrer, R. (2022). Populism and intra-party democracy. *European Journal of Political Research*, 61(4), 1143–1154. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12509>
- Borz, G., & Janda, K. (2020). Contemporary trends in party organization: Revisiting intra-party democracy. *Party Politics*, 26(1), 3–8. <https://doi.org/10.1177/1354068818754605>
- Bovens, M. (2010). Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism. *West European Politics*, 33(5), 946–967.
- Campati, A. (2022). Elite and Liberal Democracy: A New Equilibrium? *Topoi*, 41(1), 15–22.
- Cross, W. P., & Katz, R. S. (2013). *The challenges of intra-party democracy*. OUP Oxford.
- Drochon, H. (2020). Robert Michels, the iron law of oligarchy and dynamic democracy. *Constellations*, 27(2).
- Faisal, M., & Triswidodo, T. (2024). Perspektif Yuridis dan Etis terhadap Praktik Politik Oligarki di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 4075–4083.



- Forbes, H. D. (2017). Dahl, democracy, and technology. In *Democratic theory and technological society* (pp. 227–248). Routledge.
- Freeden, M., Sargent, L. T., & Stears, M. (2013). *The Oxford handbook of political ideologies*. OUP Oxford.
- Fukuyama, F. (2014). States and democracy. *Democratization*, 21(7), 1326–1340.
- Fung, A. (2020). Afterword: Does deliberative democracy have a role in our time of political crisis? *Journal of Deliberative Democracy*, 16(1).
- Fung, A., & Wright, E. O. (2001). Deepening democracy: Innovations in empowered participatory governance. *Politics & Society*, 29(1), 5–41.
- Hazan, R. Y., & Rahat, G. (2010). *Democracy within parties: Candidate selection methods and their political consequences*. OUP Oxford.
- Ignazi, P. (2020). The four knights of intra-party democracy: A rescue for party delegitimation. *Party Politics*, 26(1), 9–20.
- Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (Y. Ahsan (ed.)). Mirra Buana Media.
- Jiménez-Sánchez, M., Coller, X., & Portillo-Pérez, M. (2018). MPs of traditional parties' perceptions on candidate selection in times of political crisis and reform. In *Democratizing Candidate Selection: New Methods, Old Receipts?* (pp. 147–171). Springer.
- Juniar, A. (2021a). Redesain demokrasi internal partai politik: Upaya mencegah oligarki dan korupsi partai politik. *Jurnal Politikom Indonesiana*.
<https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/4796>
- Juniar, A. (2021b). Redesain Demokrasi Internal Partai Politik: Upaya Mencegah Oligarki dan Korupsi Partai Politik. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 6(1), 17–39. <https://doi.org/10.35706/jpi.v6i1.4796>
- Kamenova, V. (2021). Internal democracy in populist right parties: the process of party policy development in the Alternative for Germany. *European Political Science Review*, 13(4), 488–505.
- Kim, Y. (2021). Evolution of political parties and the party system in South Korea. In *Routledge Handbook of Contemporary South Korea* (pp. 65–81). Routledge.
- McCoy, J., Rahman, T., & Somer, M. (2018). Polarization and the global crisis of democracy: Common patterns, dynamics, and pernicious consequences for democratic polities. *American Behavioral Scientist*, 62(1), 16–42.
- Michels, R. (2019). The iron law of oligarchy. In *Power in modern societies* (pp. 111–124). Routledge.
- Moon, J. D. (1972). *Participation and Democracy: A Review Essay*. JSTOR.
- Muhajir, A., & Wulandari, F. (2023). Demokrasi Oligarkis dan Resesi Demokrasi di Indonesia Pasca-Suharto: Sebuah Tinjauan Sejarah Politik. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 4(1), 1–10.
- Nikulin. (2023). Oligarchy and leader are twin brothers*. *RUDN Journal of Sociology*, 23(1).
<https://doi.org/10.22363/2313-2272-2023-23-1-180-187>
- Perludem. (2017). *Demokratisasi Rekrutmen Partai Politik*. In *Jurnal Pemilu & Demokrasi* (Vol. 11).
- Rohrbach, L. (2021). Intra-party dynamics and the success of federal arrangements: Ethiopia in comparative perspective. *Regional & Federal Studies*, 31(4), 475–494.
- Scarrow, S. E. (2005). Implementing intra-party democracy. *Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives*, 22. <https://doi.org/10.1177/1354068895001001002>
- Scarrow, S. E. (2021). Intra-Party Democracy and Party Unity: Varied Rules, Varied Consequences. *Representation*, 57(1), 41–57. <https://doi.org/10.1080/00344893.2020.1785537>
- Seeberg, M. B., Wahman, M., & Skaaning, S. E. (2018). Candidate nomination, intra-party democracy, and election violence in Africa. *Democratization*, 25(6), 959–977.
<https://doi.org/10.1080/13510347.2017.1420057>
- Sete, T. A. (2018). Intra party democracy in Ethiopia: Towards a regulatory regime. *Haramaya Law Review*, 7, 22–47.
- Sunggara, M. A., Meliana, Y., Hidayat, W. A., Nain, S., & Fatma, M. (2024). *Dinamika Hukum Dan Korupsi Politik (Dampak Dan Tantangan Penegakan Hukum Di Indonesia)*. *Unizar Law Review*, 7(1), 35–48.
- Surbakti, R., & Supriyanto, D. (2013). *Buku 6 - Mendorong Demokratisasi Internal Partai Politik*. In *Seri Demokrasi Elektoral*.
- Webb, P., Scarrow, S., & Poguntke, T. (2022). Party organization and satisfaction with democracy: inside the blackbox of linkage. *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, 32(1), 151–172.



- Yunus, W. (2021). REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI TINJAU DARI UU PEMILU NO 7 TAHUN 2017 DAN UU PARTAI POLITIK NO 2 TAHUN 2011 DI KOTA PALOPO. *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum*. <http://www.ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/article/view/837>
- Zakharov, A. V. (2016). The loyalty-competence trade-off in dictatorships and outside options for subordinates. *The Journal of Politics*, 78(2), 457–466.